BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sudah dirasakan sejak dulu oleh nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi makin jatuh dalam lembah kemiskinan. Padahal jika melihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik didarat, laut, atau udara sangat melimpah. Kekayaan ini sejatinya bisa mensejahterakan penduduk pribumi. Pertanyaan yang sulit dijawab adalah mengapa negeri ini sangat sulit terbebas dari belenggu kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Menurut Martin dan Schuman, kemiskinan ditingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekayaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia (80%) dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relatif miskin.

Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan. Data penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dikalangan politisi dan akademisi. Sebenarya melihat data kemiskinan di Indonesia relatif mudah. Apa indikator utama kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, maka realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis sudah pasti telah dilakukan pemerintah melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan *charity*, membagikan uang kepada kaum dhuafa dalam bentuk program Bantuan Tunai Langsung (BLT). Namun solusi yang jitu menanggulangi kemiskinan masih belum ditemukan. Secara umum kemiskinan

dapat di golongkan dalam empat jenis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidak berdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut adalah mereka yang hidup dengan pendapatan dibawah USD $1 per hari.

Kemiskinan relatif adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Kemiskinan struktural adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif, sehingga menyebabkan miskin.

Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, tetapi banyak aspek lain yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga disebabkan lemahnya aspek moral, sosial, dan juga aspek budaya, serta kebijakan pembangunan yang belum merata. Logikanya, orang miskin umumnya pendapatan kecil dan tidak menentu. Pendapatan yang kecil ini disebabkan oleh kemampuan SDM-nya yang rendah, tidak memiliki modal usaha, atau tidak memiliki networking dalam berwirausaha. Kemiskinan juga terkait dengan aspek budaya baik menyangkut individu maupun sosial. Dalam tatanan pembangunan nasional, kemiskinan

dapat disebabkan faktor pembangunan yang tidak merata, sehingga daerah tertentu belum terjamah oleh sentuhan pembangunan.

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat yang sangat miskin (hard rock), misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari dan kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan.

Kemiskinan sejak zaman dahulu hingga sekarang belum bisa terpecahkan secara tuntas. Kemiskinan juga tidak sekedar masalah negara-negara miskin saja. Kemiskinan menyangkut negara kaya akan sumberdaya alam. Kemiskinan juga masih ditemukan dalam negara-negara maju. Kemiskinan memang komplek, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia.

Secara umum masyarakat miskin dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu golongan miskin seakali (fakir miskin), miskin, dan hampir miskin (rentan terjadi miskin). Untuk masyarakat golongan fakir miskin pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti bantuan Raskin, Bantuan Tunai Langsung, beasiswa, jamkesmas, dan sebagainya. Dalam realisasinya, bantuan tersebut ternyata tidak mudah. Masyarakat lebih suka mengaku sebagai fakir miskin dengan harapan mendapat berbagai bantuan gratisan tersebut. Akibatnya sifat ketergantungan semakin meningkat.

Menyadari sangat kompleknya masalah dan faktor penyebab kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan tidak bisa dipecahkan dari aspek ekonomi saja. Menurut Suyono (2003), penuntasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukan variabel non ekonomi. Hal ini disebabkan karena penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia. Orang menjadi miskin bukan hanya karena dia tidak mempunyai modal usaha atau

tidak punya aset produksi, akan tetapi ia berpotensi tetap miskin karena dia tidak mempunyai penyangga ekonomi.

Hakikat penyebab kemiskinan sesungguhnya adalah melekat dalam diri individu atau sosial yang bersangkutan. Masalah kemiskinan sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga mereka mampu berdaya, berdiri diatas kakinya sendiri, *autonomy* atau memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup mandiri. Dengan kata lain penuntasan kemiskinan dapat diatasi melalui pendekatan pemberdayaan.

Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah *mind set* individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Bentuk aktivitas pemberdayaan tersebut diantaranya: kegiatan pendidikan dan latihan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, menumbuhkan lembaga-lembaga non formal dalam masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktivitas lainnya. Kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan pembangunan sosial yang menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh semua unsur mulai: pemerintah, anggota legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat, dan juga media massa. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang menyentuh semua lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya. Perubahan dimulai dari hal-

hal kecil yang mudah dan bisa dilakukan individu dan lingkungannya. Perubahan juga dimulai dari saat ini, tidak menunggu komando atau kesempatan tertentu. Tahapan selanjutnya adalah penguatan dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga perubahan itu akan meningkat. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan. Selanjutnya memberi reward kepada individu atau atau masyarakat yang memiliki prestasi dalam perubahan. Pada akhirnya keberhasilan proses ini ditandai adanya perubahan perilaku individu dan masyarakat ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan keluarganya. Tahapan ini penting dilakukan sebagai motivasi bagi diri dan lingkungan di sekitarnya. Semua tahapan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan *bottom-up*, dengan cara menggali potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas. Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi inilah yang menjadi acuan agen pemberdayaan untuk menentukan perencanaan pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien/ sasaran. Keterlibatan sasaran dalam tahapan perencanaan ini, merupakan salah satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk mensukseskan program pemberdayaan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P

yaitu: pemungkinan, penguatan,perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat.
2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan donasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4) Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen. Begitu pula dalam masyarakat, keragaman karakter akan mempengaruhi terhadap agen pemberdayaan dalam memilah dan memilih cara atau teknik pelaksanaan pemberdayaan. Pemilihan cara/teknik ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Dalam hal ini, Dubois dan Miley (Suharto, 2005) menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1) Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/ sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination), menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien (client partnership).
2) Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk: menghormati dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/ sasaran.
3) Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar , serta melibatkan klien/ sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
4) Merefleksikan sikap dan nilai profesional, melakukan riset, dan perumusan kebijakan; serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidak-setaraan kesempatan.
5) Semua cara atau teknik diatas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek yang memiliki keragaman karakter, potensi dan kebutuhan.

Strategi pemberdayaan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakaat. Menurut Suyono (2009), gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model (laboratorium). Suatu model cenderung harus membuat dulu sebuah model percontohan secara

ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaftasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.

Kehidupan masyarakat memang sangat komplek. Kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat juga saling terkait. Oleh karena itu pendekatan pembangunan sulit bisa tercapai apabila dilakukan secara parsial. Pembangunan menuntut dikembangkan semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat secara simultan dan kontinyu sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakt. Pembangunan seperti itu disebut merupakan pendekatan holistik.

Dalam aspek pendidikan misalnya, pemerintah mencanangkan program penuntasan wajib belajar sembilan tahun bahkan akan ditingkatkan menjadi 12 tahun atau setingkat sekolah lanjutan atas. Upaya penuntasan wajib belajar ini tidak cukup menyediakan banyak sekolah dan sarana pendukung sekolah lainnya.

Namun kenyataannya program prioritas pemerintah wajib belajar 9 tahun ini masih belum tercapai 100 persen. Upaya-upaya tersebut ditujukan dengan harapan semua anak usia sekolah pendidikan dasar (usia 7 s.d 15 tahun) dapat mengikuti salah satu bentuk layanan pendidikan yang sesuai. Namun, kenyataannya bentuk layanan tersebut masih belum bisa menjaring semua anak-anak untuk mengikuti pendidikan dasar. Realitasnya, anak-anak yang belum mencapai wajar 9 tahun tersebut berasal dari kelompok masyarakat yang sulit atau hard rock. Kelompok masyarakat itu tersebar tidak hanya di daerah pedesaan atau daerah terpencil, melainkan juga berada dipinggiran kota dan juga perkotaan. Mereka pada umumnya berasal dari kelompok

masyarakat yang masih miskin, terbelakang, dan cenderung termarjinalkan. Oleh karena itu pemberdayaan sektor pendidikan, perlu ditunjang oleh sektor lainnya terutama kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan juga budaya.

Uraian diatas menunjukkan begitu kompleksnya masalah pembangunan atau pemberdayan masyarakat. Pemberdayaan sektor pendidikan tidak cukup didekati oleh aspek pendidikan saja, tetapi harus dilakukan secara holistik menyangkut berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan tersebut, misalnya membangun aspek ekonomi, sosial budaya, kesehatan, keagamaan dan aspek-aspek lainnya. Pembangunan masyarakat tidak bisa berhasil dengan baik apabila ditangani oleh salah satu kementrian atau lembaga tertentu. Kementrian atau lembaga yang ada sangat perlu melakukan koordinasi dan kerjasama. Hal ini yang nampaknya masih lemah dalam sistem pembangunan di Indonesia. Adanay menteri koordinator merupakan upaya untuk mensinergikan pembangunan menuju pendekatan holistik tadi. Walaupun dalampraktiknya masih sulit, bahkan tidak sedikit dalam lingkungan satu kementrian saja terkesan berjalan sendiri-sendiri dan kurangnya koordinasi antar unit terkait.

Dalam lingkup pembangunan atau pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan, pendukuhan, atau kelompok masyarakat terkecil lainnya, hendaknya dilakukan secara holistik. Penanganan satu masalah perlu dilakukan melalui berbagai aspek terkait. Begitu pula diperlukan keterlibatan tidak hanya klien/ sasaran, tetapi melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada, serta memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dengan cara tersebut, maka pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan efektif.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan pengamatan dilapangan, dapat di definisikan bahwa keluarga memiliki kesiapan ekonomi yang memadai merupakan salah satu syarat sangat penting dalam suatu perkawinan, disamping fisik dan mental. Penghasilan

memadai bukan berarti berlebih, namun lebih mempunyai makna dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan untuk menjamin kelangsungan hidup berkeluarga. Karena penghasilan yang tidak memadai seringkali menjadi penyebab kurang serasinya hubungan antar keluarga, terutama apabila kebutuhan pokok setiap anggota keluarga tidak dapat dipenuhi. Rasa curiga cepat sekali muncul diantara keluarga yang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi dan apabila tidak diatasi dengan baik dapat berdampak pada konflik dalam keluarga. Kondisi nyata (kondisi objektif) perjalanan eksistensi UPPKS pada umumnya sebagai wadah demokrasi penyalur aspirasi masyarakat dihadapkan dengan kesulitan untuk memiliki usaha atau keterampilan yang berkualitas termasuk dana dan fasilitas yang memadai.

Kurangnya kesempatan beraktivitas karena kesibukan lain sebagai ibu/isteri di dalam mengurus rumah tangganya ditambah dengan pengetahuan / kemampuannya dalam usaha masih rendah, sehingga mempengaruhi terhadap sikapnya yang menerima apa adanya dan cenderung tidak memiliki keinginan untuk merubah dirinya dalam usaha meningkatkan ekonomi keluarganya.

Melalui kegiatan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), diharapkan adanya peningkatan pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, baik pada peserta KB yang bersangkutan maupun seluruh anggota kelompoknya. Dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan secara tidak langsung kesertaan dan kesinambungan ber KB pun dapat ditingkatkan. Dengan adanya kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), diharapkan terdapatnya Konsep Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan adanya Responden Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga yang baik, serta adanya Strategi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dilakukan oleh kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Bina Bakti Desa Sukajaya, dengan harapkan adanya dampak dari Pemberdayaan Keluarga.

C. RUMUSAN MASALAH DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, apakah Gerakan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) dapat meningkatkan ekonomi keluarga?, Untuk lebih spesifiknya dikembangkan dengan pertanyaan. Bagaimana Konsep Pemberdayaan Ekonomi Keluarga?, Bagaimana Responsibiliti Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)?, Bagaimana Strategi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dilakukan oleh kelompok UPPKS Bina Bakti Desa Sukajaya?, dan Bagaimana dampak dari Pemberdayaan Keluarga?.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini pada hakekat nya bertujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang terumuskan diatas. Untuk kepentingan ini secara rinci tujuan ini spesifikasinya sebagai berikut:

Tujuan Umum

1. Mendeskripsikan tentang Konsep Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
2. Mendeskripsikan tentang Responsibiliti Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
3. Mendeskripsikan tentang Strategi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dilakukan oleh kelompok UPPKS Bina Bakti Desa Sukajaya.
4. Mendekripsikan tentang Dampak dari Pemberdayaan Keluarga.

Tujuan Khusus

1. Bagaimana Konsep Pemberdayaan Ekonomi Keluarga?,
2. Bagaimana Responsibiliti Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)?
3. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dilakukan oleh kelompok UPPKS Bina Bakti Desa Sukajaya?

4. Bagaimana Dampak dari Pemberdayaan Keluarga?

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil Penelitian diharapkan bermanfaat untuk :

1. Sebagai Kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu atau konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi keluarga.
2. Bahan kajian bagi tenaga praktis dilapangan dalam rangka peningkatan pembinaan kelompok UPPKS yang bermakna bagi pemberdayaan wanita.
3. Sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang berminat untuk meneliti lebih lanjut dalam rangka kepentingan ilmiah atau praktisi.
4. Sebagai kontribusi bagi keluarga akseptor KB atau PUS untuk menambah pengetahuannya dalam pemberdayaan ekonomi keluarga yang secara tidak langsung dapat menjadikan keluarga akseptor KB atau PUS dalam kelestarian ber KB.
5. Sebagai kontribusi bagi kelompok UPPKS Bina Bakti juga dalam mengembangkan usaha kelompok atau per orangan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

F. DEFINISI OPERASIONAL

“ Definisi Operasional adalah suatu rumusan yang menggambarkan keadaan, kegiatan atau perilaku yang dapat diukur atau diamati.“ (Sukmadinata, N. Sy. 2006:235). Untuk itu istilah yang digunakan dalam judul dan istilah dalam penelitian ini akan diuraikan definisi opersionalnya sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kemampuan melakukan kontrol terhadap sosial, politik, dan ekonomi, sehingga masyarakat mampu menempatkan / memposisikan dirinya dalam masyarakat dimasa depan (Sudjana. D. 1996:63).

2. Yang dimaksud dengan pembangunan masyarakat adalah proses yang disengaja melalui bimbingan dan arahan untuk mencapai kemajuan dibidang sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif dan kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun (Santoso dalam Subrata. K. 1985:12)
3. Yang dimaksud dengan pembangunan masyarakat diartikan pula sebagai persenyawaan atau produksi dari dua kegiatan yaitu Pengorganisasian masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat (Subrata. K. 1985: 13).
4. Yang dimaksud dengan Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
5. Yang dimaksud dengan Kelompok UPPKS adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera mulai dari Keluarga Prasejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum ber KB, serta amggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif (UEP).
6. Yang dimaksud Keluarga Prasejahtera (KPS) adalah Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan ibadah, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
7. Yang dimaksud Keluarga Sejahtera I adalah Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

8. Yang dimaksud ekonomi keluarga adalah Urusan keuangan rumahtangga dan Keluarga adalah terdiri dari ayah,ibu dan anaknya, atan ayah dan anak, atau ibu dan anak.

G. KERANGKA BERPIKIR
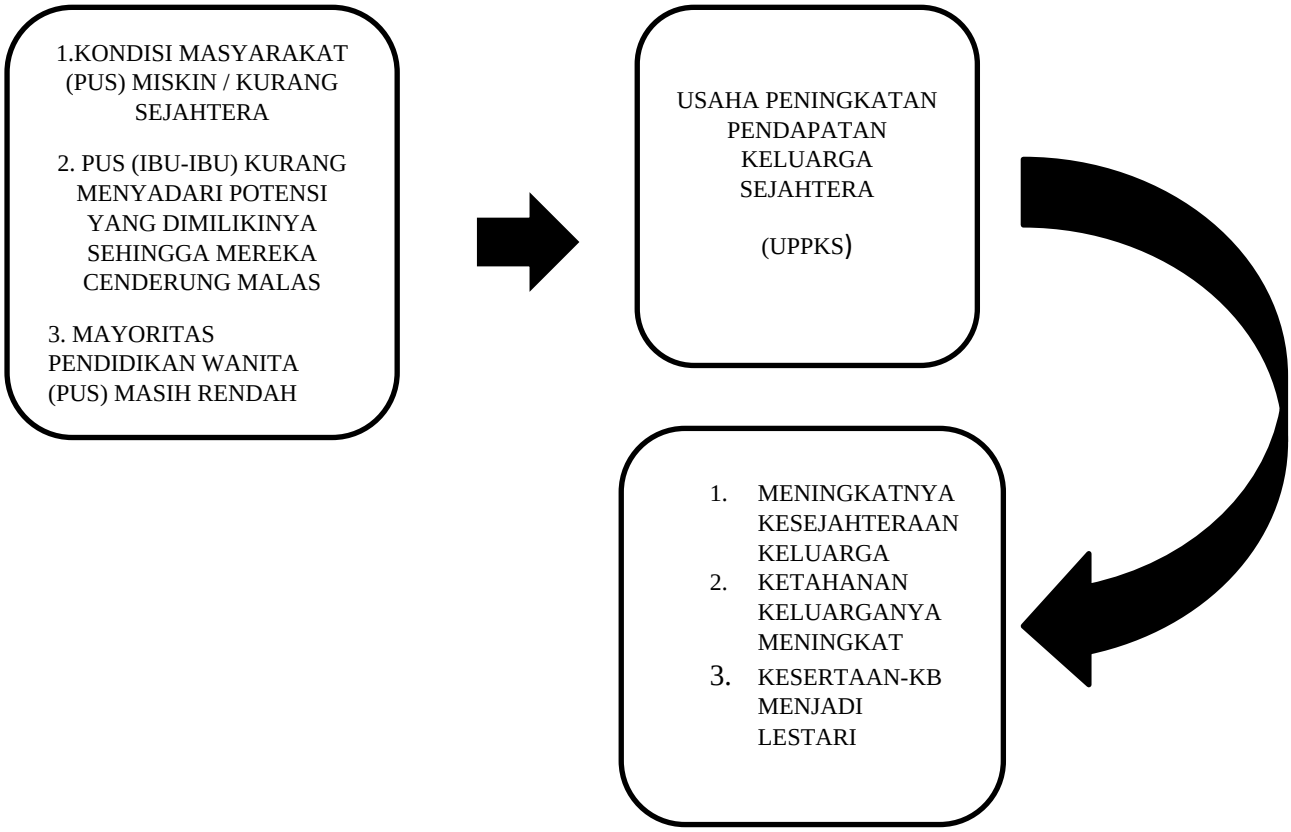
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir